



Purbaya Effect dan Tertib Anggaran Publik dalam Perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory

Rina Komala¹, Layali Ihyani²

¹ Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci:

Akuntabilitas fiskal,
Purbaya Effect, Tertib
anggaran publik, Agency
Theory, Stewardship
Theory

Abstrak

Akuntabilitas fiskal merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan erat dengan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, Purbaya Effect muncul sebagai konstruksi analitis yang menekankan konsistensi fiskal, kehati-hatian, dan disiplin anggaran, sejalan dengan prinsip tertib anggaran publik yang menuntut kepatuhan prosedural dalam seluruh siklus penganggaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji akuntabilitas fiskal melalui pendekatan integratif antara Agency Theory dan Stewardship Theory. Agency Theory menekankan pentingnya mekanisme kontrol, insentif, dan pengawasan untuk meminimalkan asimetri informasi dan moral hazard, sementara Stewardship Theory menyoroti peran kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aktor publik. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mensintesis literatur akademik, regulasi fiskal, dan temuan empiris relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi kontrol formal dan motivasi intrinsik berbasis nilai publik mampu memperkuat efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan tata kelola fiskal. Studi ini berkontribusi secara teoretis melalui pengayaan perspektif tata kelola sektor publik dan secara praktis melalui rekomendasi kebijakan fiskal yang seimbang antara regulasi, pengawasan, dan etika birokrasi.

Keywords

Keywords:

Fiscal accountability,
Purbaya Effect, Public
budget orderliness,
Agency Theory,
Stewardship Theory

Abstract

Fiscal accountability is a fundamental pillar of good governance, as it is closely associated with transparency, efficiency, and responsible management of public resources. In the Indonesian context, the Purbaya Effect has emerged as a new analytical construct emphasizing fiscal consistency, prudence, and budgetary discipline, aligning with the principle of orderly public budgeting that requires procedural compliance throughout the budgeting cycle. This study aims to examine fiscal accountability through an integrative framework combining Agency Theory and Stewardship Theory. Agency Theory highlights the role of control mechanisms, incentives, and monitoring to address information asymmetry and moral hazard, whereas Stewardship Theory emphasizes trust, integrity, and the moral commitment of public actors. Using a literature review method, this study synthesizes academic literature, fiscal regulations, and relevant empirical findings to develop a comprehensive conceptual framework of fiscal accountability. The results indicate that the integration of formal control mechanisms and intrinsic, public-value-driven motivation leads to more effective, transparent, and sustainable fiscal governance. The study contributes theoretically by enriching public sector governance literature and practically by offering policy recommendations for balancing regulation, oversight, trust, and bureaucratic ethics in fiscal management.

*Corresponding Author: **Rina Komala**, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia;

Email: rina.komala@universitasbumigora.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.979>

History Artikel:

Received: 18 September 2025 | Accepted: 29 Desember 2025

PENDAHULUAN

Akuntabilitas fiskal merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena menyangkut pengelolaan sumber daya publik secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab (Montes et al., 2019; Tekdemir & Yeşil, 2025). Dalam konteks pengelolaan anggaran, akuntabilitas fiskal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Badewin et al., 2025; Natision et al., 2022; Pratiwi et al., 2024). Ketika pemerintah mampu menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, legitimasi kebijakan fiskal akan semakin kuat (Awoonor, 2025; Chen & Neshkova, 2020; ElBerry & Goeminne, 2021; Setyawan, 2025). Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas fiskal berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, hingga krisis kepercayaan publik (Babajani et al., 2023; Islam, 2025; Paul & Malachy, 2025; Zein & Septiani, 2025).

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas fiskal semakin relevan dengan munculnya fenomena Purbaya Effect yang mencerminkan dorongan konsistensi fiskal dan disiplin anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global (Adrison, 2024; Haryono, 2025; Indrawati et al., 2024; Widiastuti et al., 2023). Fenomena ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBN agar kebijakan fiskal tetap kredibel dan berkelanjutan (Lee, 2024). Sejalan dengan itu, konsep tertib anggaran publik menekankan pentingnya disiplin dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Arifuddin et al., 2025; Fitria et al., 2025; Sarjoko et al., 2022; Suhartono et al., 2025; Vambia et al., 2025). Kedua fenomena ini saling melengkapi bahwa Purbaya Effect menegaskan komitmen politik dan moral terhadap konsistensi fiskal, sementara tertib anggaran publik menyediakan mekanisme teknis dan normatif untuk mewujudkan akuntabilitas fiskal yang berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana akuntabilitas fiskal dipahami dalam kerangka teori yang berbeda. Agency Theory menekankan akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol untuk mengatasi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal melalui insentif, monitoring, regulasi, dan pelaporan untuk mengurangi konflik kepentingan serta biaya keagenan (Panda & Leepsa, 2017; Payne & Petrenko, 2019; SUMMARYATI et al., 2020). Perspektif ini menekankan regulasi, insentif, dan pengawasan ketat agar pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk melalui penguatan sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, dan kerangka tata kelola berbasis regulasi untuk menekan kecurangan

dan meningkatkan akuntabilitas keuangan publik (Anto & Yusran, 2023; Din et al., 2022; Schillemans & Bjurström, 2020). Sebaliknya, Stewardship Theory menawarkan sudut pandang yang lebih optimis dengan menekankan motivasi intrinsik berupa kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aktor publik untuk bertindak demi kepentingan masyarakat, di mana agen dipandang sebagai steward yang berorientasi pada tujuan organisasi dan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri (Godwin et al., 2021). Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana kedua teori ini dapat diintegrasikan untuk menjelaskan akuntabilitas fiskal secara lebih komprehensif, sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang menemukan bahwa kombinasi mekanisme kontrol (agency) dan kepercayaan/kolaborasi (stewardship) sering kali menghasilkan rezim tata kelola yang lebih memuaskan (Madison et al., 2016). Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang menghadapi kompleksitas birokrasi, desentralisasi fiskal, serta kebutuhan peningkatan akuntabilitas dan konsistensi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah (Fatoni, 2020; Isman et al., 2025).

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena memperkenalkan konsep Purbaya Effect sebagai konstruksi analitis baru dalam kebijakan fiskal Indonesia, serta mengintegrasikan Agency Theory dan Stewardship Theory untuk menjelaskan akuntabilitas fiskal secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang selama ini cenderung menekankan mekanisme kontrol ala Agency Theory, namun kurang mengakomodasi dimensi kepercayaan dan komitmen moral ala Stewardship Theory, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian literatur yang komprehensif mengenai akuntabilitas fiskal pemerintah Indonesia dengan menggunakan perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini berupaya mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, regulasi fiskal, serta kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas fiskal dipahami dan dijalankan dalam tata kelola pemerintahan (Abdullah et al., 2022; Din et al., 2022; Hidayat et al., 2025; Natision et al., 2022). Dengan menelaah kedua teori tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan dalam memaknai akuntabilitas fiskal, sekaligus menawarkan pemahaman konseptual yang lebih utuh mengenai desain tata kelola dan hubungan principal-agent/steward dalam sektor publik.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya literatur tata kelola sektor publik dengan mengintegrasikan perspektif Agency Theory dan

Stewardship Theory dalam menjelaskan akuntabilitas fiskal dan perilaku aktor publik (Obermann et al., 2020; Schillemans & Bjurstrøm, 2020). Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan birokrasi publik dalam merancang strategi pengelolaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada mekanisme kontrol dan pengawasan, tetapi juga pada penguatan kepercayaan, integritas, nilai publik, dan komitmen moral dalam pelaksanaan anggaran (Idrus, 2024; Nurchoiriyah et al., 2025; Rhamadhani & Edeh, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia.

Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent yang ditandai oleh asimetri informasi, potensi moral hazard, dan konflik kepentingan, sehingga diperlukan mekanisme kontrol, pemantauan, dan insentif untuk mengurangi risiko penyimpangan perilaku agen (Marenga, 2025). Dalam konteks akuntabilitas fiskal sektor publik, perspektif principal-agent digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah (agen) dapat menyimpang dari kepentingan publik (principal) ketika informasi, insentif, dan mekanisme akuntabilitas tidak dirancang secara memadai (Schillemans & Bjurstrøm, 2020).

Stewardship Theory

Stewardship Theory berangkat dari asumsi bahwa pelaksana kebijakan dan pegawai publik cenderung kolektivistik, pro-organisasional, dan dapat dipercaya, sehingga lebih termotivasi oleh tujuan bersama dan nilai pelayanan publik dibandingkan kepentingan pribadi semata (Davis et al., 1997; Hsu & Zhang, 2025; Rouault & Albertini, 2022; Torfing & Bentzen, 2020). Dalam kerangka akuntabilitas fiskal, stewardship menekankan pentingnya kepercayaan, internalisasi nilai-nilai pelayanan publik, dan orientasi jangka panjang untuk mendorong pengelolaan sumber daya keuangan yang bertanggung jawab tanpa harus sepenuhnya bergantung pada mekanisme kontrol yang kaku dan transaksional (Godwin et al., 2021; Schillemans & Bjurstrøm, 2020; Torfing & Bentzen, 2020; Yu, 2023).

Perbandingan Agency Theory dan Stewardship Theory dalam Konteks Fiskal

Agency Theory dan Stewardship Theory sama-sama menganalisis relasi delegasi antara principal dan pelaksana (agent/steward), tetapi berangkat dari asumsi perilaku yang kontras: agency menekankan individualisme, konflik tujuan, mistrust, dan kontrol sedangkan stewardship menekankan kolektivisme,

keselarasan tujuan, trust, dan pemberdayaan (Davis et al., 1997; Rouault & Albertini, 2022; Torfing & Bentzen, 2020). Dalam tata kelola dan akuntabilitas fiskal, keduanya tidak selalu saling meniadakan; berbagai studi menunjukkan bahwa rezim pengelolaan keuangan publik yang efektif justru mengombinasikan instrumen kontrol ala agency (pelaporan, monitoring, kinerja) dengan pendekatan stewardship berbasis kepercayaan, dialog, dan kemitraan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus motivasi dan kinerja organisasi publik (Mills et al., 2021; Salomonsen et al., 2024; Schillemans & Bjurstrøm, 2020; Yu, 2023).

Tabel 1. Ringkasan Hubungan Agency Theory dan Stewardship Theory

Aspek	Agency Theory	Stewardship Theory	Sumber
Asumsi perilaku	Self-interest, oportunistik	Pro-organisasi, prososial	(Davis et al., 1997; Rouault & Albertini, 2022; Torfing & Bentzen, 2020)
Mekanisme utama	Kontrol, insentif, monitoring	Kepercayaan, empowerment, dialog	(Mills et al., 2021; Rouault & Albertini, 2022; Schillemans & Bjurstrøm, 2020; Torfing & Bentzen, 2020)
Implikasi fiskal	Desain kontrak & pengawasan ketat	Trust-based, orientasi jangka panjang	(Godwin et al., 2021; Schillemans & Bjurstrøm, 2020; Yu, 2023)

Sumber: Data Diolah, 2025

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) atau kajian pustaka, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan pengintegrasian berbagai sumber tertulis yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Chigbu et al., 2023; Lim et al., 2022; Linnenluecke et al., 2020). Literature review dipandang sebagai metodologi yang penting untuk memetakan state

of the art suatu bidang, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan membangun kontribusi teoretis (Kraus et al., 2022; Marzi et al., 2025; Snyder, 2024). Peneliti mengidentifikasi konsep, temuan empiris, serta kerangka teoritis dari penelitian-penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai akuntabilitas fiskal dalam perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory. Pendekatan ini cocok digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual, memetakan perkembangan kajian, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) di bidang tata kelola fiskal.

Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah (baik nasional maupun internasional, yang membahas akuntabilitas fiskal, tata kelola sektor publik, Agency Theory, dan Stewardship Theory), buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen resmi seperti regulasi dan pedoman yang relevan (Mohajan, 2018). Penggunaan beragam sumber dokumen (articles, reports, policy documents, official records) merupakan praktik lazim dalam kajian literatur di ilmu sosial (Visic, 2022; Yavuz, 2022). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu hanya dokumen yang relevan dengan tema akuntabilitas fiskal dan kerangka Agency–Stewardship yang dianalisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Sintesis Tematik (Thematic Synthesis)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengkodean (coding) terhadap isi artikel, buku, dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti: konsep akuntabilitas fiskal, mekanisme kontrol, kepercayaan dan integritas, serta konsistensi fiskal. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan dan disintesis sehingga menghasilkan pemetaan tematik yang menjelaskan bagaimana akuntabilitas fiskal dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai konteks (Chong et al., 2021; Purssell & Gould, 2021).

Komparasi Teori (Comparative Analysis)

Langkah berikutnya adalah membandingkan pemaknaan akuntabilitas fiskal berdasarkan Agency Theory dan Stewardship Theory. Analisis komparatif ini menelaah perbedaan asumsi dasar, mekanisme pengendalian, peran aktor publik, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan oleh masing-masing teori (Elsbach & Van Knippenberg, 2020; Torraco, 2016). Dari komparasi ini, peneliti mengidentifikasi titik temu (complementarity) maupun potensi ketegangan (tension) antara kedua perspektif dalam konteks tata kelola fiskal.

Integrasi Hasil Penelitian Terdahulu (Integrative Review)

Temuan-temuan dari berbagai penelitian empiris dan kajian konseptual diintegrasikan untuk membangun kerangka berpikir yang lebih utuh (Elsbach & Van Knippenberg, 2020). Integrasi dilakukan dengan beberapa langkah, yakni pertama, mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan fokus seperti transparansi anggaran, disiplin fiskal, kepatuhan regulasi, kepercayaan publik. Kedua, dengan menilai konsistensi atau perbedaan temuan antar studi. Terakhir, dengan menghubungkan hasil-hasil tersebut dengan kerangka Agency dan Stewardship untuk merumuskan model konseptual akuntabilitas fiskal yang relevan dengan konteks Indonesia.

Melalui kombinasi sintesis tematik, komparasi teori, dan integrasi hasil penelitian terdahulu, metode ini diharapkan mampu menghasilkan kajian literatur yang sistematis, mendalam, dan bermanfaat sebagai dasar pengembangan teori maupun rekomendasi kebijakan di bidang akuntabilitas fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Purbaya Effect dalam Kebijakan Fiskal Indonesia dan Akuntabilitas Fiskal

Istilah “Purbaya Effect” belum muncul eksplisit dalam literatur ilmiah arus utama tentang kebijakan fiskal Indonesia, sehingga konsep ini perlu dijelaskan sebagai konstruksi analitis yang merujuk pada pola kebijakan fiskal tertentu (misalnya kehati-hatian fiskal yang kuat, fokus pada keberlanjutan utang, serta disiplin defisit) dan dampaknya terhadap akuntabilitas fiskal. Literatur tentang kebijakan fiskal dan desentralisasi di Indonesia dapat digunakan sebagai dasar untuk memaknai dan memposisikan efek ini.

Definisi dan Konteks dalam Kebijakan Fiskal Indonesia

Pasca pandemi, kebijakan fiskal Indonesia ditandai oleh sikap yang lebih konservatif dan berhati-hati, dengan pengetatan defisit, penurunan rasio utang, serta fokus pada keberlanjutan jangka panjang dan efisiensi belanja (Indrawati et al., 2024; Nursawitri et al., 2025). Pendekatan ini tampak pada beberapa hal berikut.

1. Upaya mempersempit defisit anggaran sekaligus menurunkan rasio utang pemerintah melalui konsolidasi fiskal setelah periode ekspansi pandemi.
2. Penekanan pada kualitas belanja, reformasi subsidi energi, dan realokasi anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
3. Kebutuhan penguatan basis penerimaan melalui reformasi pajak, peninjauan insentif, dan peningkatan administrasi perpajakan.

Dalam konteks desentralisasi, pola kebijakan fiskal juga tercermin pada bagaimana transfer ke daerah dan otonomi fiskal dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan syarat tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang memadai (Yustianto et al., 2025). Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja daerah dan akuntabilitas, tetapi juga membuka peluang korupsi bila pengawasan lemah (Fatoni, 2020). Dengan demikian, “Purbaya Effect” dapat didefinisikan sebagai kecenderungan kebijakan fiskal Indonesia yang mengutamakan kehati-hatian (prudence), konsolidasi, dan keberlanjutan, yang berimbang pada desain defisit, utang, komposisi belanja, dan tata kelola fiskal pusat–daerah.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Fiskal

1. Penguatan akuntabilitas melalui disiplin fiskal dan keterikatan pada aturan
 - Konsolidasi defisit, pengendalian utang, dan penajaman prioritas belanja mendorong kebutuhan akan pelaporan yang transparan dan dapat diaudit, sehingga memperkuat akuntabilitas fiskal baik di pusat maupun daerah (Indrawati et al., 2024; Nursawitri et al., 2025; Yustianto et al., 2025).
 - Kerangka desentralisasi fiskal yang lebih jelas dan terstruktur meningkatkan kinerja OPD dan akuntabilitas penggunaan APBD jika disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat (Yustianto et al., 2025).
2. Tantangan akuntabilitas: trade-off antara desentralisasi dan risiko korupsi
 - Desentralisasi fiskal di Indonesia empiris menunjukkan “dua sisi mata uang”: di satu sisi meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, di sisi lain meningkatkan probabilitas korupsi ketika pengawasan, moralitas aparatur, dan sistem pengendalian internal lemah (Fatoni, 2020).
 - Dalam kerangka Purbaya Effect, disiplin fiskal yang ketat tanpa penguatan kelembagaan dan integritas bisa menyebabkan akuntabilitas hanya bersifat formalistik, sementara penyimpangan tetap terjadi di tingkat pelaksanaan (Fatoni, 2020).
3. Implikasi untuk desain tata kelola fiskal ke depan
 - Kebijakan fiskal yang hati-hati perlu dibarengi penguatan sistem pengendalian internal, transparansi, dan partisipasi publik, agar konsolidasi fiskal benar-benar tercermin dalam peningkatan akuntabilitas, bukan sekadar angka di atas kertas (Fatoni, 2020; Nursawitri et al., 2025; Yustianto et al., 2025).
 - Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dan peningkatan kapasitas OPD menjadi kunci, karena akuntabilitas fiskal nasional banyak

ditentukan oleh bagaimana dana transfer dan PAD dikelola di daerah (Fatoni, 2020; Nursawitri et al., 2025; Yustianto et al., 2025).

Tabel 2. Ringkasan Purbaya Effect dan Akuntabilitas Fiskal

Aspek	Purbaya Effect (konseptual)	Dampak pada akuntabilitas fiskal
Orientasi kebijakan	Konsolidasi defisit, penurunan utang, fokus kualitas belanja	Meningkatkan tuntutan transparansi dan pelaporan fiskal
Desentralisasi fiskal	Transfer ke daerah untuk layanan publik, dengan otonomi pengelolaan	Dapat memperbaiki kinerja & akuntabilitas OPD bila regulasi jelas
Risiko tata kelola	Otonomi fiskal di daerah dengan pengawasan lemah	Akuntabilitas meningkat, namun probabilitas korupsi juga naik
Agenda ke depan	Reformasi pajak, efisiensi belanja, penguatan institusi	Butuh integrasi pengendalian internal, moralitas aparatur, dan oversight

Sumber: Data diolah (2025)

Tertib Anggaran Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas

“Tertib anggaran publik” adalah kondisi ketika seluruh siklus anggaran (perencanaan–pelaksanaan–pelaporan–pengawasan) mengikuti aturan, prosedur, dan batasan fiskal yang jelas. Prinsip ini tidak hanya teknis, tetapi menjadi fondasi kepercayaan publik karena berkaitan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Prinsip Disiplin Anggaran dalam Tata Kelola Fiskal

Disiplin atau tertib anggaran diwujudkan melalui:

1. Penyusunan anggaran berbasis regulasi (UU, PP, Permendagri, Perbup/Perda) dan standar akuntansi pemerintah, yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hermanto et al., 2021; Juliyanti et al., 2025; Wardah & Horri, 2025).
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan value for money (ekonomis, efisien, efektif) sehingga penggunaan dana sesuai sasaran dan menghindari pemborosan (Annur & Arza, 2022; Hermanto et al., 2021; Saraswati & Suhartini, 2022).
3. Proses pelaporan yang rutin (LKIP, LPPD, LKPJ, laporan desa) dan dapat diaudit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan aturan

(Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025; Wardah & Horri, 2025).

Disiplin anggaran ini juga menjadi bagian dari prinsip good governance (tata kelola yang baik) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan aturan (Annur & Arza, 2022; Natalia & Sujana, 2022; Saragih et al., 2025; Wardah & Horri, 2025).

Hubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas

- 1. Transparansi sebagai prasyarat tertib anggaran
 - Transparansi berarti keterbukaan informasi anggaran: perencanaan, APBD/APBDes, realisasi, dan laporan keuangan dapat diakses publik (fisik maupun digital, misalnya website, media sosial, SIPD) (Hermanto et al., 2021; Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025; Saraswati & Suhartini, 2022; Wardah & Horri, 2025).
 - Transparansi terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja keuangan publik, mendorong pengawasan sosial, dan menekan penyalahgunaan anggaran (Busri, 2024; Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025).
- 2. Akuntabilitas sebagai konsekuensi dari tertib anggaran
 - Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik melalui pelaporan yang jelas, tepat waktu, dan sesuai regulasi (Busri, 2024; Natalia & Sujana, 2022).
 - Penelitian di desa dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran (Busri, 2024; Hermanto et al., 2021; Tamsil et al., 2025).
- 3. Sinergi terkait dengan tertib anggaran–transparansi–akuntabilitas
 - Aturan yang mewajibkan keuangan dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel membentuk satu paket tata kelola fiskal: disiplin prosedur + keterbukaan informasi + kewajiban bertanggung jawab (Hermanto et al., 2021; Natalia & Sujana, 2022; Saraswati & Suhartini, 2022).
 - Pada level desa dan daerah, penerapan prinsip ini membantu mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat pengawasan terhadap dana publik (Juliyanti et al., 2025; Saragih et al., 2025).

Tabel 3. Tertib Anggaran, Transparansi, dan Akuntabilitas di Berbagai Level

Level	Bentuk tertib anggaran & praktik	Dampak transparansi & akuntabilitas
Desa	APBDes disusun & dilaporkan sesuai Permendagri/PMK; penggunaan sistem (Siskeudes)	Pengelolaan keuangan desa lebih baik; kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat
Pemda	Kewajiban kelola keuangan tertib, efisien, transparan, akuntabel (UU 23/2014, Perbup)	Laporan rutin, SIPD, akses informasi; memperkuat pengawasan DPRD, BPK, publik
Organisasi publik lain	Anggaran berbasis kinerja, value for money, pelaporan dan audit reguler	Kinerja anggaran membaik; risiko pemborosan dan kecurangan berkurang

Sumber: Data diolah (2025)

Tertib anggaran publik menuntut disiplin dalam setiap tahap pengelolaan anggaran, yang hanya dapat berjalan efektif bila didukung transparansi (keterbukaan informasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban formal dan moral). Penelitian di desa dan pemerintah daerah Indonesia menunjukkan bahwa ketika ketiga unsur ini berjalan bersama, kualitas tata kelola fiskal dan kepercayaan publik meningkat.

Integrasi Agency & Stewardship Theory dalam Akuntabilitas Fiskal

Dalam akuntabilitas fiskal, hubungan antara rakyat (principal) dan pengelola keuangan publik (agent/steward) tidak pernah murni soal kontrol saja atau kepercayaan saja. Penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa kombinasi keduanya sering menghasilkan tata kelola yang paling memuaskan bagi para pelaku.

Agency Theory: Kontrol dan Insentif

Mengasumsikan pejabat publik bersifat self-interest, berpotensi oportunistik, dengan konflik kepentingan terhadap principal (Egbon, 2024; Mengiste, 2022). Sehingga, solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan kontrak, indikator kinerja, monitoring, audit, dan insentif–sanksi (pay for performance, reward, punishment) untuk menekan moral hazard dan memastikan kepatuhan fiskal (Han, 2020). Dalam konteks keuangan publik, mekanisme ini tampak pada pengawasan ketat, pelaporan wajib, dan konsekuensi atas penyimpangan anggaran.

Stewardship Theory: Kepercayaan dan Komitmen

Mengasumsikan pejabat berorientasi intrinsik dan pro-sosial, dengan nilai dan tujuan yang relatif selaras dengan principal (Rouault & Albertini, 2022; Torfing & Bentzen, 2020). Menekankan trust, empowerment, shared goals, dan komitmen terhadap kepentingan

publik jangka panjang, bukan hanya pemenuhan target jangka pendek (Rouault & Albertini, 2022). Hal ini paling tepat digunakan dalam menjelaskan konteks birokrasi yang memiliki misi pelayanan dan nilai institusional kuat (Torfing & Bentzen, 2020).

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah praktis menggabungkan kontrol (agency) dan kepercayaan (stewardship) dalam tata kelola lembaga publik; rezim yang paling memuaskan adalah yang menyeimbangkan keduanya, bukan ekstrem salah satu (Schillemans & Bjurström, 2020; Torfing & Bentzen, 2020). Akuntabilitas tetap esensial bahkan dalam kerangka stewardship; kepercayaan perlu didukung mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas, bukan dibiarkan tanpa pengawasan (Dumay et al., 2019; Keay, 2017). Dalam akuntabilitas fiskal, agency theory menjelaskan kebutuhan aturan, monitoring, dan insentif, sedangkan stewardship menjelaskan motivasi internal, loyalitas, dan komitmen etis yang membuat aturan itu benar-benar dihayati dan bukan sekadar formalitas (Rouault & Albertini, 2022; Schillemans & Bjurström, 2020; Torfing & Bentzen, 2020).

Tabel 4. Integrasi pada Akuntabilitas Keuangan Publik

Dimensi	Agency (kontrol)	Stewardship (kepercayaan)	Kontribusi ke akuntabilitas fiskal
Desain sistem	Kontrak, indikator, audit	Otonomi, dialog, co-design tujuan	Sistem kuat + buy-in pelaksana
Perilaku pejabat	Taat karena insentif/sanksi	Taat karena nilai dan misi publik	Mengurangi fraud & meningkatkan kualitas layanan
Relasi pusat–agen	Monitoring ketat	Trust & partnership	Kontrol efisien tanpa mematikan motivasi

Sumber: Data diolah (2025)

Agency theory memberi fondasi bagi desain mekanisme kontrol, insentif, dan sanksi dalam akuntabilitas fiskal, sedangkan stewardship theory menjelaskan kepercayaan, komitmen, dan motivasi pro-publik para pengelola keuangan. Integrasi keduanya menghasilkan kerangka akuntabilitas fiskal yang lebih realistis: kontrol yang cukup untuk mencegah penyimpangan, namun berbasis kepercayaan dan nilai sehingga mendorong kinerja dan integritas jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur mengenai akuntabilitas fiskal pemerintah Indonesia dengan perspektif Agency Theory dan Stewardship Theory, dapat

disimpulkan bahwa akuntabilitas fiskal tidak hanya ditopang oleh mekanisme kontrol formal seperti regulasi, pengawasan, dan pelaporan, tetapi juga oleh nilai-nilai kepercayaan, integritas, dan komitmen moral aparatur publik. Integrasi kedua teori menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang efektif menuntut keseimbangan antara pengendalian eksternal dan motivasi intrinsik pelaksana kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis akuntabilitas fiskal sektor publik dengan menggabungkan perspektif hubungan principal–agent dan stewardship, sehingga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana akuntabilitas dibangun dalam konteks birokrasi Indonesia. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan dalam tata kelola fiskal dan kebijakan publik.

Secara praktis, hasil kajian ini mengindikasikan pentingnya desain kebijakan fiskal yang tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi, tetapi juga pada pengembangan budaya organisasi yang menumbuhkan nilai pelayanan publik, transparansi, dan etika pengelolaan anggaran. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusional, kualitas informasi anggaran, serta partisipasi publik untuk mencegah moral hazard dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fiskal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya berbasis kajian literatur dan tidak menggunakan data empiris primer. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum teruji secara langsung dalam konteks praktik pengelolaan anggaran di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris, baik kualitatif maupun kuantitatif, guna menguji kerangka teoritis yang diajukan. Penelitian dapat diarahkan pada analisis perilaku aktor birokrasi, efektivitas instrumen transparansi fiskal, maupun hubungan antara desain mekanisme akuntabilitas dengan kinerja fiskal pemerintah di berbagai level pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I., Sudirman, Masdar, R., Din, M., & Firman, M. F. (2022). Antecedents of the Accountability in Indonesian Local Government Financial Reporting. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5), e0709. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e709>
- Adrison, V. (2024). Fiscal Sustainability in Indonesia: Policies and Progress. *Asian Economic Policy*

- Review, 19(2), 224–247.
<https://doi.org/10.1111/aepr.12468>
- Annur, Y. G., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Tata Kelola, Komitmen Organisasi dan Reward terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 4(4), 738–750.
<https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.579>
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of the Quality of Financial Reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e01331.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Arifuddin, I., Jumadi, Yamin, M., Wahira, & Kasmawati, A. (2025). Strategies For Implementing Activity Priority Analysis (APK) To Achieve Good Governance In Indonesia. *International Journal of Economics, Accounting and Management*, 2(2), 95–104.
<https://doi.org/10.60076/ijeam.v2i2.1283>
- Awoonor, M. (2025). An Examination of the Effects of the Public Finance Management Act on Responsibility in the Government Sector in Ghana, Nigeria, and South Africa. *African Journal on Impact, Economic and Social Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.63159/617432>
- Babajani, J., Ghorbanizadeh, V., Bolou, G., & Dost Jabaarian, J. (2023). Assessing the Current State of Financial Transparency in the Government of the Islamic Republic of Iran and Providing Solutions to Improve it. *Journal of Value & Behavioral Accounting*, 8(15), 1–36. <https://doi.org/10.61186/aapc.8.15.1>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Busri, B. (2024). Kebijakan Fiskal Perspektif Islam. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(2), 155–167.
<https://doi.org/10.62730/journalofeconomicanislamicresearch.v2i2.105>
- Chen, C., & Neshkova, M. I. (2020). The effect of fiscal transparency on corruption: A panel cross-country analysis. *Public Administration*, 98(1), 226–243. <https://doi.org/10.1111/padm.12620>
- Chigbu, U. E., Atiku, S. O., & Du Plessis, C. C. (2023). The Science of Literature Reviews: Searching, Identifying, Selecting, and Synthesising. *Publications*, 11(1), 2.
<https://doi.org/10.3390/publications11010002>
- Chong, S. W., Jun, L. T., & Chen, Y. (2021). *A Methodological Review of Systematic Literature Reviews in Higher Education: Heterogeneity and Homogeneity*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jn84b>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20.
<https://doi.org/10.2307/259223>
- Din, M., Munawarah, M., Ghazali, I., Achmad, T., & Karim, F. (2022). Governance of financial management and regulation-based fiscal accountability. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2), 116–123.
<https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art10>
- Dumay, J., La Torre, M., & Farneti, F. (2019). Developing trust through stewardship: Implications for intellectual capital, integrated reporting, and the EU Directive 2014/95/EU. *Journal of Intellectual Capital*, 20(1), 11–39.
<https://doi.org/10.1108/JIC-06-2018-0097>
- Egbon, T. N. (2024). Application of Agency Theory in Administrative Accountability and Public Service Delivery in Local Government Councils in Delta State. *International Journal of Public Administration Studies*, 3(2), 125.
<https://doi.org/10.29103/ijpas.v3i2.13890>
- ElBerry, N. A., & Goeminne, S. (2021). Fiscal transparency, fiscal forecasting and budget credibility in developing countries. *Journal of Forecasting*, 40(1), 144–161.
<https://doi.org/10.1002/for.2695>
- Elsbach, K. D., & Van Knippenberg, D. (2020). Creating High-Impact Literature Reviews: An Argument for ‘Integrative Reviews.’ *Journal of Management Studies*, 57(6), 1277–1289.
<https://doi.org/10.1111/joms.12581>
- Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 101–110.
<https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110>
- Fitria, F., Nuriyatman, E., Amir, L., & Sitta Saraya. (2025). Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 147–161.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>
- Godwin, K., Ntayi, J. M., & Munene, J. C. (2021). Accountability and Public Interest in Government Institutions. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 155–166.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672187>
- Han, Y. (2020). The impact of accountability deficit on agency performance: Performance-

- accountability regime. *Public Management Review*, 22(6), 927–948. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1679237>
- Haryono, H. (2025). The Relationship between Public Debt, Government Efficiency, and Corruption Control on Fiscal Sustainability in Indonesia. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 3(02), 301–309. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v3i02.1943>
- Hermanto, F. T. W., Widiyanto, A., & Aryanto, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. *Owner*, 5(2), 502–512. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.416>
- Hidayat, M. F., Pradana, G. W., Maruf, M. F., Anggraeni, Z. P., Darmayanti, W. A., Nurwidya, M. P., Shobirin, D. R., & Fitrie, R. A. (2025). Gaining Insight into Fiscal Decentralization at Producing Public Value (Accountability) Through Public Goods and Public Interest: Literature Review of Fiscal Decentralization in the Indonesian and Global Context. *KnE Social Sciences*, 10(4), 308–325. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18043>
- Hsu, H.-Y., & Zhang, Y. (2025). Public Organizational Stewardship: Conceptualization and Application. *Perspectives on Public Management and Governance*, 8(1), 27–37. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvaf001>
- Idrus, A. (2024). Exploring Public Finance Policies: A Qualitative Inquiry into Fiscal Policy Analysis, Government Financial Management, and Public Sector Financial Health. *Golden Ratio of Finance Management*, 4(2), 87–99. <https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.481>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Islam, S. (2025). A Systematic Review Of Public Budgeting Strategies In Developing Economies: Tools For Transparent Fiscal Governance. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, 01(01), 602–635. <https://doi.org/10.63125/wm547117>
- Isman, M. H. S., Salomo, R. V., & Bakri, M. R. (2025). Integration of fiscal policy and accountability to improve public services in Indonesia: From transfers to outcomes. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(2). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v11i2.2108>
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabuapten Sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 375–386. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.13>
- Keay, A. (2017). Stewardship theory: Is board accountability necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1292–1314. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Lee, C. (2024). Comment on “Fiscal Sustainability in Indonesia: Policies and Progress.” *Asian Economic Policy Review*, 19(2), 248–249. <https://doi.org/10.1111/aep.12472>
- Lim, W. M., Kumar, S., & Ali, F. (2022). Advancing knowledge through literature reviews: ‘What’, ‘why’, and ‘how to contribute.’ *The Service Industries Journal*, 42(7–8), 481–513. <https://doi.org/10.1080/02642069.2022.2047941>
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175–194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Madison, K., Holt, D. T., Kellermanns, F. W., & Ranft, A. L. (2016). Viewing Family Firm Behavior and Governance Through the Lens of Agency and Stewardship Theories. *Family Business Review*, 29(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/0894486515594292>
- Marenga, R. (2025). Theory-Praxis: Principals vs. Agents among Namibian Public Enterprises. *iRASD Journal of Management*, 7(1), 27–40. <https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.2876>
- Marzi, G., Balzano, M., Caputo, A., & Pellegrini, M. M. (2025). Guidelines for Bibliometric-Systematic Literature Reviews: 10 steps to combine analysis, synthesis and theory development. *International Journal of Management Reviews*, 27(1), 81–103. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12381>
- Mengiste, B. W. (2022). Agency Theory: Its Discourse and Practice in the Selected Public-Sectors. *Journal of Social Sciences and Management*

- Studies*, 1(4), 34–43.
<https://doi.org/10.56556/jssms.v1i4.342>
- Mills, D. E., Bradley, L., & Keast, R. (2021). NPG and Stewardship theory: Remedies for NPM privatization prescriptions. *Public Management Review*, 23(4), 501–522.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1695883>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology In Social Sciences And Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23.
<https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- Montes, G. C., Bastos, J. C. A., & De Oliveira, A. J. (2019). Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach. *Economic Modelling*, 79, 211–225.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.013>
- Natalia, S. A. P. D., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i12.p06>
- Natison, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 415–434.
<https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Nurchoiriyah, A. P., Sofia, E., Beri, F., & Djasuli, M. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Kewajiban BLU Di Indonesia: (Studi Literatur 2022–2025). *Jurnal Maneksi*, 14(2), 568–577.
<https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.2983>
- Nursawitri, M. R., Sulistyaningsih, N., Nova, M. H., Jannah, M., Maryam, K. I., Simanjuntak, G. A. S., & Nuraya, A. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Permintaan Agregat dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Studi Literatur 2020–2024. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2), 146–158.
<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.147>
- Obermann, J., Velte, P., Gerwanski, J., & Kordsachia, O. (2020). Mutualistic symbiosis?: Combining theories of agency and stewardship through behavioral characteristics. *Management Research Review*, 43(8), 989–1011.
<https://doi.org/10.1108/MRR-07-2019-0317>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
<https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Paul, C., & Malachy, J. (2025). E-Governance Initiatives and Financial Management in the Nigerian Public Sector: An Integrated Conceptual Framework for Enhancing Transparency and Efficiency. *Dutch Journal of Finance and Management*, 8(1), 35020.
<https://doi.org/10.55267/djfm/16409>
- Payne, G. T., & Petrenko, O. V. (2019). Agency Theory in Business and Management Research. In G. T. Payne & O. V. Petrenko, *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.5>
- Pratiwi, R. I., Ah, H., & Kusumawati, A. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in the Public Sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(10), 1165–1180.
<https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>
- Purssell, E., & Gould, D. (2021). Undertaking qualitative reviews in nursing and education—A method of thematic analysis for students and clinicians. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 3, 100036.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2021.100036>
- Rhamadhani, R. F., & Edeh, F. O. (2024). Citizen Participation and Digital Governance in Public Sector Accountability. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(4), 200–210.
<https://doi.org/10.61194/ijat.v2i4.715>
- Rouault, J., & Albertini, E. (2022). Reconciling the social sector with external accountability requirements: Lessons from stewardship theory. *Journal of Business Research*, 142, 485–498.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.082>
- Salomonsen, H. H., Schillemans, T., & Brummel, L. (2024). Aligning the steering of governmental organizations a comparative mixed-methods study in Denmark using stewardship theory. *Public Management Review*, 26(11), 3320–3341.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2332778>
- Saragih, M. A. J., Sari, E. N., & Irfan, I. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 73–86.

- <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>
- Saraswati, N. P. A., & Suhartini, D. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 459. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.569>
- Sarjoko, D., Khusaini, M., & Sakti, R. K. (2022). Vertical Fiscal Balance and Local Fiscal Discipline in Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 150–161. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1681>
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Setyawan, W. (2025). Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i2.291>
- Snyder, H. (2024). Designing the literature review for a strong contribution. *Journal of Decision Systems*, 33(4), 551–558. <https://doi.org/10.1080/12460125.2023.2197704>
- Suhartono, S., Sartono, S., Hadi, S., & Fahmi, F. (2025). Strengthening Legal Accountability in Regional Budgeting: A New Framework for Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 4(1). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6149>
- Sumaryati, A., Praptika Novitasari, E., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.N10.795>
- Tamsil, Yunus, R., & Mariati. (2025). Peningkatan Tata Kelola Fiskal Perdesaan Melalui Transparansi Keuangan Berbasis Masyarakat. *Journal Publicuho*, 8(1), 581–590. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.690>
- Tekdemir, N., & Yeşil, E. (2025). An Empirical Investigation on the Relationship between Fiscal Transparency and Institutional Quality. *Bulletin of Economic Theory and Analysis*, 10(1), 233–256. <https://doi.org/10.25229/beta.1589338>
- Torfin, J., & Bentzen, T. Ø. (2020). Does Stewardship Theory Provide a Viable Alternative to Control-Fixated Performance Management? *Administrative Sciences*, 10(4), 86. <https://doi.org/10.3390/admsci10040086>
- Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Present to Explore the Future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Vambia, A. D., Septiana, E. A., Putra, M. S. W. P., & Gunawan, R. R. (2025). Evaluating Regulatory Compliance in Village Budgeting: A Case Study of Village Budget Implementation. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 10(01), 59–70. <https://doi.org/10.33062/ajb.v10i01.79>
- Visic, M. (2022). Connecting puzzle pieces: Systematic literature review method in the social sciences. *Sociologija*, 64(4), 543–562. <https://doi.org/10.2298/SOC2204543V>
- Wardah, F., & Horri, M. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 41–53. <https://doi.org/10.69714/49wh8w97>
- Widiastuti, N., Fitriady, A., & Widodo, T. (2023). Assessing Fiscal Sustainability in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 101. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p101>
- Yavuz, N. (2022). Systematic Literature Review In Social Sciences. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1134606>
- Yu, J. (2023). Agency autonomy, public service motivation, and organizational performance. *Public Management Review*, 25(3), 522–548. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1980290>
- Yustianto, Dr. B. P., Epenetus, A. J., Rozika, T. F., & Syarif, A. (2025). The Effect of Fiscal Decentralization on the Performance of Regional Apparatus Organizations. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(1), 161–171. <https://doi.org/10.35912/sakman.v5i1.3611>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2025). Improving Local Government Financial Performance: The Role of Management, Transparency, and Accountability. *Journal of Posthumanism*, 5(6), 4858–4871. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2698>